Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)
e-ISSN: 2963-3176 Page. 77-95
Vol. 05 No. 06 (2026): November 2026
DOI: ***https://doi.org/10.9000/jpt.v5i6.2257***
Received: 12 Oktober. ***Revised:*** 27 Oktober. ***Published:*** 10 November.
Available online at : https://jupetra.org/index.php/jpt/issue/archive
ISSN 2963-3176

Konsep Dan Urgensi Pancasila Dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia Sebagai Fundamental Peradaban

Nadhin Shakila Nur Ashika[1], Siti Roadatul Aisya[2], Rianita Muttofi'ah[3], Zaenul Slam[4]

[1, 2, 3] Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

**Corresponding email:* nadhinshakilanurashika@gmail.com

Abstrak - Pancasila memiliki peran penting sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dirumuskan melalui proses panjang oleh para pendiri bangsa. Nilai-nilai dasarnya seperti gotong royong, keadilan, persatuan, dan religiusitas telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat jauh sebelum kemerdekaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penerapan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa serta pentingnya penguatan karakter generasi muda di era globalisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif berbasis kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila mengalami berbagai penafsiran sesuai konteks sosial-politik, namun tetap relevan sebagai pedoman moral dan dasar kehidupan berbangsa. Penguatan pemahaman dan pembumian nilai-nilai Pancasila menjadi kunci untuk membentuk karakter bangsa yang berkepribadian kuat, adil, dan beradab.

Kata Kunci: Pancasila, nilai-nilai bangsa, karakter generasi muda, globalisasi, dasar negara

Abstract *- Pancasila plays a vital role as the foundation of the state, national ideology, and guiding principle for Indonesian society, formulated through a long historical process by the nation's founders. Its core values mutual cooperation, justice, unity, and religiosity have existed long before Indonesia's independence. This study aims to analyze the dynamics of Pancasila's implementation across different eras and the importance of strengthening youth character in the globalization era. The research employs a qualitative method based on literature review. The findings indicate that Pancasila's values have undergone various interpretations depending on the social and political context, yet remain relevant as a moral compass and foundation for national life. Strengthening understanding and internalization of Pancasila's values is essential to build a generation with strong identity, justice, and civility.*

Keywords*: Pancasila, national values, youth character, globalization, state foundation*

Karya ini dilisensikan di bawah *Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License* .

Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)
e-ISSN: 2963-3176 Page. 77-95
Vol. 05 No. 06 (2026): November 2026
DOI: ***https://doi.org/10.9000/jpt.v5i6.2257***
Received: 12 Oktober. ***Revised:*** 27 Oktober. ***Published:*** 10 November.
Available online at : *https://jupetra.org/index.php/jpt/issue/archive*
ISSN 2963-3176

Pendahuluan

Pancasila adalah landasan sekaligus ideologi bangsa yang berperan sebagai pedoman dalam seluruh bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai penuntun moral, sosial, politik, dan budaya dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Menurut Notonagoro (1975), Pancasila tidak hanya berperan sebagai dasar negara, tetapi juga merupakan sistem filsafat yang mencerminkan pandangan hidup dan karakter bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh terhadap Pancasila menjadi kunci penting dalam membangun identitas nasional dan menentukan arah perkembangan bangsa.

Secara historis, Pancasila lahir melalui perjalanan panjang yang tak terpisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebenarnya telah mengakar dan hidup dalam budaya masyarakat Indonesia jauh sebelum dirumuskan secara resmi oleh para pendiri bangsa. Kaelan (2002) menyatakan bahwa Pancasila merupakan hasil penyaringan nilai-nilai luhur yang bersumber dari jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Proses perumusannya, yang dimulai dari pidato Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945 hingga disepakatinya rumusan akhir oleh Panitia Sembilan, mencerminkan bahwa ideologi ini lahir dari semangat persatuan dan kebersamaan dalam keberagaman.

Sebagai ideologi negara, Pancasila memegang peranan penting dalam menjaga persatuan dan kestabilan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi landasan dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. M. Syamsudin dkk. (2009) menjelaskan bahwa Pancasila merupakan cita-cita normatif yang mendasari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, berasaskan pada nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Karena itu, pemahaman yang kuat terhadap konsep dan urgensi Pancasila sangat dibutuhkan agar bangsa Indonesia tetap mampu menjaga jati dirinya di tengah arus globalisasi dan perubahan sosial yang terus berlangsung.

Metode

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang bersumber dari berbagai referensi seperti buku, artikel, jurnal, maupun karya ilmiah lain yang dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki relevansi dengan topik penelitian. Pada bagian ini

Karya ini dilisensikan di bawah *Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License* .

Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)
e-ISSN: 2963-3176 Page. 77-95
Vol. 05 No. 06 (2026): November 2026
DOI: ***https://doi.org/10.9000/jpt.v5i6.2257***
Received: 12 Oktober. ***Revised:*** 27 Oktober. ***Published:*** 10 November.
Available online at : https://jupetra.org/index.php/jpt/issue/archive
ISSN 2963-3176

juga dijelaskan konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Karena menggunakan metode studi pustaka, proses pengumpulan dan analisis data dilakukan sepenuhnya melalui kajian terhadap buku, artikel, dan jurnal (Zed, 2008). Dengan demikian, penerapan metode kualitatif melalui studi pustaka diharapkan dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dengan lebih mudah.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Perumusan Pancasila

Peran Pancasila dari Masa Sebelum Kemerdekaan hingga Pengesahannya

1. Masa Pra-Kemerdekaan: Akar Nilai dan Fondasi Moral Bangsa

Sebelum istilah Pancasila dikenal secara resmi, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah hidup dan berkembang dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Nusantara. Nilai seperti gotong royong, keadilan, musyawarah, dan penghormatan terhadap sesama sudah menjadi pedoman dalam tata kehidupan tradisional berbagai suku bangsa di Indonesia. Nilai-nilai ini menjadi fondasi moral dan sosial yang kelak melahirkan falsafah Pancasila.

Pada awal abad ke-20, gerakan kebangkitan nasional mulai muncul sebagai respons terhadap penindasan kolonial. Organisasi seperti Budi Utomo (1908) menumbuhkan kesadaran akan pentingnya persatuan nasional; Sarekat Islam (1911) menanamkan nilai keadilan dan kesejahteraan sosial; sementara Perhimpunan Indonesia (1925) memperkenalkan semangat kebangsaan dan kedaulatan rakyat di kancah internasional. Semangat kebangsaan dan nilai-nilai luhur inilah yang menjadi benih bagi lahirnya Pancasila.

Menurut Notonagoro (1975), nilai-nilai Pancasila tidak diciptakan oleh satu individu, tetapi merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia yang telah ada sejak dahulu kala. Dengan demikian, sebelum kemerdekaan, Pancasila telah berperan sebagai “ruh kebangsaan” yang menuntun perjuangan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan.

2. Masa BPUPKI: Lahirnya Konsep dan Rumusan Awal Pancasila

Ketika Jepang mulai terdesak oleh Sekutu dalam Perang Dunia II, mereka berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 April 1945. Tujuannya adalah menyelidiki dan merumuskan dasar bagi

Karya ini dilisensikan di bawah *Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License* .

Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)
e-ISSN: 2963-3176 Page. 77-95
Vol. 05 No. 06 (2026): November 2026
DOI: ***https://doi.org/10.9000/jpt.v5i6.2257***
Received: 12 Oktober. ***Revised:*** 27 Oktober. ***Published:*** 10 November.
Available online at : https://jupetra.org/index.php/jpt/issue/archive
ISSN 2963-3176

pemerintahan Indonesia yang akan merdeka. Dalam sidang pertama BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945), tiga tokoh utama menyampaikan gagasannya tentang dasar negara:

1. Mohammad Yamin (29 Mei 1945) – Mengajukan lima asas dasar negara yaitu: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat.
2. Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945) – Mengemukakan gagasan negara integralistik yang menekankan kesatuan antara pemimpin dan rakyat tanpa pemisahan kekuasaan.
3. Ir. Soekarno (1 Juni 1945) – Mengusulkan istilah "Pancasila" yang berisi lima dasar: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 ini dianggap sebagai lahirnya Pancasila secara filosofis. Gagasan ini kemudian diterima secara luas dan menjadi dasar bagi penyusunan lebih lanjut dalam panitia kecil. Untuk menyatukan perbedaan antara golongan nasionalis dan Islam, dibentuk Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945 yang diketuai oleh Soekarno dan beranggotakan delapan tokoh lain, yaitu Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, Achmad Subardjo, Agus Salim, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hasyim, dan A.A. Maramis.

Panitia ini menghasilkan Piagam Jakarta (Jakarta Charter), yang menjadi dokumen kompromi politik penting antara kelompok Islam dan nasionalis. Dalam rumusan awal, sila pertama berbunyi, "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Piagam Jakarta ini dijadikan naskah pembukaan dalam rancangan Undang-Undang Dasar yang dibahas dalam Sidang Kedua BPUPKI (10–17 Juli 1945).

3. Masa Sidang Kedua BPUPKI (10–17 Juli 1945): Penyusunan Konstitusi

Sidang kedua BPUPKI memfokuskan diri pada rancangan Undang-Undang Dasar. Dalam sidang ini dibahas bentuk negara (republik atau monarki), sistem pemerintahan, wilayah negara, dan kewarganegaraan. Mayoritas anggota memilih bentuk negara Republik Indonesia, dengan sistem pemerintahan presidensial yang demokratis. Hasil sidang kedua menghasilkan:

- Pembukaan yang diambil dari Piagam Jakarta.
- Batang Tubuh UUD berisi 37 pasal.

Karya ini dilisensikan di bawah *Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License* .

Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)
e-ISSN: 2963-3176 Page. 77-95
Vol. 05 No. 06 (2026): November 2026
DOI: ***https://doi.org/10.9000/jpt.v5i6.2257***
Received: 12 Oktober. ***Revised:*** 27 Oktober. ***Published:*** 10 November.
Available online at : https://jupetra.org/index.php/jpt/issue/archive
ISSN 2963-3176

- Penjelasan tambahan tentang sistem pemerintahan dan prinsip kenegaraan.

Dokumen ini menjadi fondasi hukum pertama bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

4. Masa PPKI (18 Agustus 1945): Pengesahan Pancasila sebagai Dasar Negara

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang pada 18 Agustus 1945 untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang tersebut, terjadi perubahan penting terhadap sila pertama Piagam Jakarta atas usulan Mohammad Hatta, setelah menerima masukan dari tokoh-tokoh Indonesia Timur. Rumusan sila pertama diubah dari "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa." Perubahan ini mencerminkan semangat persatuan dan toleransi yang menjadi jiwa bangsa Indonesia. Dengan disahkannya UUD 1945, maka Pancasila resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia.

5. Makna Historis dan Filosofis Pancasila dalam Proses Kemerdekaan

Peran Pancasila dari masa sebelum kemerdekaan hingga pengesahannya menunjukkan beberapa dimensi penting:

- Sebagai Ideologi Persatuan: Pancasila mempersatukan berbagai kelompok etnis, agama, dan ideologi dalam satu cita-cita kebangsaan.
- Sebagai Falsafah Negara: Menjadi dasar normatif dan filosofis dalam penyusunan sistem hukum dan pemerintahan Indonesia.
- Sebagai Kompromi Politik: Menjadi titik temu antara aspirasi Islam dan nasionalisme sekuler.
- Sebagai Refleksi Nilai Lokal: Mengangkat kearifan Nusantara sebagai dasar kehidupan berbangsa.
- Sebagai Pedoman Etika Nasional: Memandu arah pembangunan bangsa menuju keadilan sosial dan kemanusiaan.

Menurut Kaelan (2018), Pancasila adalah "ideologi terbuka" yang mampu beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai dasar filsafat bangsa. Dari seluruh proses sejarah tersebut,

Karya ini dilisensikan di bawah *Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License* .

Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)
e-ISSN: 2963-3176 Page. 77-95
Vol. 05 No. 06 (2026): November 2026
DOI: ***https://doi.org/10.9000/jpt.v5i6.2257***
Received: 12 Oktober. ***Revised:*** 27 Oktober. ***Published:*** 10 November.
Available online at : https://jupetra.org/index.php/jpt/issue/archive
ISSN 2963-3176

dapat disimpulkan bahwa Pancasila tidak lahir secara spontan, tetapi melalui proses dialektika historis, politik, dan sosial yang panjang. Nilai-nilai Pancasila berasal dari akar budaya bangsa, dikembangkan melalui gagasan para tokoh pergerakan, kemudian dirumuskan secara sistematis dalam sidang-sidang BPUPKI, disempurnakan oleh Panitia Sembilan, dan akhirnya disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Pancasila menjadi simbol konsensus nasional, dasar ideologi negara, dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang terus relevan hingga kini.

B. Menggambarkan Nilai-Nilai yang Mendasari dan Proses Perumusan oleh Para Pendiri Bangsa

Pada saat bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa tidak hanya mendirikan negara secara fisik, namun juga menetapkan dasar ideologi dan nilai-nilai yang akan menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai ini kemudian dirumuskan dalam konsep dasar negara yang dikenal sebagai Pancasila, yang menjadi landasan dari sistem ketatanegaraan, perilaku bermasyarakat, dan identitas bangsa.

Nilai-Nilai Dasar Bangsa:

1. Sumber Nilai

Nilai-nilai dasar bangsa Indonesia berasal dari pengalaman historis bangsa, adat istiadat, agama, dan kebudayaan sehingga bukan sekadar ide asing yang diimpor secara utuh, melainkan "diangkat" dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat Indonesia sendiri. Sebagai contoh: konsep persatuan dalam keragaman, gotong royong, musyawarah, keadilan sosial, religiusitas, semua ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan.

2. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila

Sebagai instrumen formal, Pancasila mencerminkan nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- Ketuhanan atau religiusitas (sila I)
- Kemanusiaan atau kemanusiaan yang adil dan beradab (sila II)
- Persatuan Indonesia (sila III)
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (sila IV)
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila V)

Karya ini dilisensikan di bawah *Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License* .

Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)
e-ISSN: 2963-3176 Page. 77-95
Vol. 05 No. 06 (2026): November 2026
DOI: ***https://doi.org/10.9000/jpt.v5i6.2257***
Received: 12 Oktober. ***Revised:*** 27 Oktober. ***Published:*** 10 November.
Available online at : https://jupetra.org/index.php/jpt/issue/archive
ISSN 2963-3176

Sejumlah penelitian menyebut bahwa nilai-nilai ini menjadi karakter khas bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai: pandangan hidup (weltanschauung) bangsa, dasar ideologi, dan norma arah tujuan masyarakat, bangsa dan negara.

3. Fungsi Nilai-Nilai Dasar

Nilai-nilai dasar tersebut memiliki beberapa fungsi penting:

- Sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pembentukan undang-undang dan tindakan pemerintahan.
- Sebagai identitas dan ciri khas bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi dan tantangan perubahan nilai.
- Sebagai sarana pemersatu dalam keragaman suku, agama dan budaya dengan semangat "bersatu dalam keberagaman".

Proses Perumusan oleh Para Pendiri Bangsa

Para pendiri bangsa Indonesia menghadapi realitas kemajemukan (suku, agama, budaya), bekas penjajahan, dan tuntutan modernitas sekaligus nasionalisme. Mereka menyadari bahwa negara yang akan dibangun harus memiliki landasan nilai yang dapat menyatukan dan mempersatukan rakyat Indonesia yang pluriform. Prosesnya bukan instan, melainkan melalui refleksi filosofis, musyawarah, dan konsensus nasional.

Beberapa tahapan utama yang dapat diidentifikasi:

1. Refleksi nilai-kultural: Menggali nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia (adat, agama, budaya) sebagai bahan dasar.
2. Pembahasan oleh badan persiapan kemerdekaan: Misalnya melalui BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang membahas dasar negara dan rumusan nilai.
3. Musyawarah untuk mencapai konsensus nasional: Para tokoh bangsa berunding, mendebat, dan akhirnya menyepakati rumusan bersama – sebuah bentuk overlapping consensus.
4. Ratifikasi formal: Rumusan tersebut kemudian diformalkan melalui dokumen dasar negara, misalnya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan ditetapkan sebagai

Karya ini dilisensikan di bawah *Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License* .

Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)
e-ISSN: 2963-3176 Page. 77-95
Vol. 05 No. 06 (2026): November 2026
DOI: ***https://doi.org/10.9000/jpt.v5i6.2257***
Received: 12 Oktober. ***Revised:*** 27 Oktober. ***Published:*** 10 November.
Available online at : *https://jupetra.org/index.php/jpt/issue/archive*
ISSN 2963-3176

pedoman nasional.

Perumusan nilai-nilai ini juga menghadapi tantangan seperti:

1. Perbedaan pandangan antar tokoh mengenai agama, negara, ideologi.
2. Tekanan ideologi luar dan pemikiran modern/asing yang masuk ke Indonesia.
3. Kebutuhan untuk menjaga relevansi nilai dalam perubahan zaman.

Nilai-nilai dasar yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa sejatinya tetap relevan sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan kontemporer: globalisasi, pluralitas, demokrasi, hak asasi manusia. Sebagai contoh, penguatan karakter kebangsaan dengan merujuk kepada Pancasila menjadi salah satu respons terhadap perubahan zaman. Artikel-jurnal juga menekankan bahwa nilai-nilai tersebut tidak boleh dilupakan atau diterapkan secara mekanis saja, melainkan harus diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Menggambarkan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia serta memahami proses perumusan oleh para pendiri bangsa penting untuk memperkuat jati diri, karakter, dan arah bangsa. Dengan memahami akar nilai tersebut dan cara bagaimana para pendiri mendapatkan dan memformulasikannya, kita lebih mampu menghargai warisan ideologis bangsa serta mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa dan bernegara.

Urgensi Pancasila

Peran Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan dan dalam membangun negara

Pancasila merupakan dasar dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang berperan sebagai landasan serta ideologi negara. Nilai-nilai Pancasila perlu diwariskan kepada generasi penerus karena mencerminkan jati diri dan warisan para pendiri bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi cara untuk menjaga kelestariannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tujuan penerapan nilai Pancasila antara lain:

1. Menjadi dasar moral dalam berbagai aspek kehidupan;
2. Menuntun etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
3. Menjadi acuan dalam menilai serta memperbaiki perilaku sosial.

Pancasila memiliki lima prinsip dan lima nilai utama yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar filsafat bangsa Indonesia, Pancasila berperan

Karya ini dilisensikan di bawah *Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License* .

Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)
e-ISSN: 2963-3176 Page. 77-95
Vol. 05 No. 06 (2026): November 2026
DOI: ***https://doi.org/10.9000/jpt.v5i6.2257***
Received: 12 Oktober. ***Revised:*** 27 Oktober. ***Published:*** 10 November.
Available online at : https://jupetra.org/index.php/jpt/issue/archive
ISSN 2963-3176

sebagai arah moral dan panduan dalam mewujudkan kehidupan yang adil, sejahtera, dan harmonis. Pancasila berlandaskan pada lima prinsip utama yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Indonesia, yakni nilai religius, kesetaraan, penghormatan terhadap setiap individu, solidaritas, serta pengambilan keputusan melalui musyawarah. Selain itu, Pancasila juga mencerminkan lima nilai utama yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa, yaitu nasionalisme, kemanusiaan, keberagaman, demokrasi, dan kesejahteraan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tetap memiliki relevansi di era globalisasi dan modernisasi. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk menghadapi berbagai tantangan global yang berpotensi mempengaruhi jati diri bangsa, keberagaman budaya, serta dinamika ekonomi dan politik nasional.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama mengandung nilai religius yang mencerminkan hubungan manusia dengan kekuatan Ilahi yang dianggap suci dan agung. Nilai ini menuntun masyarakat untuk hidup berlandaskan keimanan dan membentuk generasi muda yang bersemangat dalam melakukan kebaikan demi mendapatkan ridho Tuhan Yang Maha Esa (Ratri & Najicha, 2022). Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, nilai Ketuhanan tetap relevan sebagai pengingat agar masyarakat Indonesia senantiasa menjunjung tinggi ajaran agama dan keyakinannya di tengah perubahan zaman.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab penting dalam menghadapi globalisasi dan modernisasi. Masyarakat Indonesia perlu menghargai perbedaan, menyelesaikan konflik secara damai, dan menjunjung toleransi. Sikap saling menghormati ini menjadi kunci terciptanya hubungan yang harmonis serta kemajuan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Persatuan Indonesia

Nilai Persatuan Indonesia menekankan pentingnya menjaga kesatuan bangsa di tengah arus globalisasi yang dapat mempengaruhi identitas dan budaya nasional. Penerapan nilai ini memperkuat semangat nasionalisme serta mencegah perpecahan akibat perbedaan. Persatuan juga menjadi dasar dalam pemerataan pembangunan dan integrasi antar daerah guna memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Semangat nasionalisme dan patriotisme perlu terus ditanamkan, khususnya pada generasi muda, agar tumbuh rasa cinta tanah air dan komitmen menjaga persatuan bangsa (Minarso &

Karya ini dilisensikan di bawah *Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License* .

Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)
e-ISSN: 2963-3176 Page. 77-95
Vol. 05 No. 06 (2026): November 2026
DOI: ***https://doi.org/10.9000/jpt.v5i6.2257***
Received: 12 Oktober. ***Revised:*** 27 Oktober. ***Published:*** 10 November.
Available online at : https://jupetra.org/index.php/jpt/issue/archive
ISSN 2963-3176

Najicha, 2022).

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat menekankan pentingnya tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Sari & Najicha, 2022). Dalam menghadapi globalisasi dan modernisasi, nilai ini relevan untuk memperkuat demokrasi, mendorong transparansi, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, nilai kerakyatan juga menumbuhkan budaya dialog, toleransi, dan kerja sama yang memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima mengandung nilai keadilan sosial yang menuntun masyarakat untuk hidup harmonis, menjunjung asas kekeluargaan, dan semangat gotong royong. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sehingga keseimbangan antara hak dan kewajiban harus dijaga dengan menghormati hak orang lain (Wibowo & Najicha, 2022).

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi, nilai keadilan sosial tetap relevan. Dalam bidang ekonomi, nilai ini mendorong pemerataan kesejahteraan dan distribusi sumber daya yang adil. Dalam bidang politik, ia menegakkan demokrasi yang partisipatif dan setara bagi seluruh rakyat. Sementara dalam bidang sosial, nilai ini memperkuat persatuan bangsa serta kepedulian terhadap kelompok yang kurang beruntung.

Peranan Pancasila terhadap Globalisasi dan Modernisasi. Di tengah pesatnya perkembangan globalisasi dan modernisasi, Pancasila memiliki peran penting sebagai dasar negara sekaligus penyaring agar masyarakat mampu membedakan pengaruh budaya yang positif dan negatif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk globalisasi sangat dibutuhkan untuk menjaga jati diri bangsa. Dalam menghadapi tantangan tersebut, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku menjadi hal yang utama. Setiap nilai Pancasila dijabarkan melalui norma dan peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Lickona (2013), ada sepuluh nilai moral yang perlu ditanamkan pada generasi muda, yaitu kebijaksanaan, keadilan, keteguhan, pengendalian diri, kasih sayang, sikap positif, kerja keras, kemampuan mengembangkan potensi, integritas, dan kerendahan hati.

Karya ini dilisensikan di bawah *Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License* .

Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)
e-ISSN: 2963-3176 Page. 77-95
Vol. 05 No. 06 (2026): November 2026
DOI: ***https://doi.org/10.9000/jpt.v5i6.2257***
Received: 12 Oktober. ***Revised:*** 27 Oktober. ***Published:*** 10 November.
Available online at : https://jupetra.org/index.php/jpt/issue/archive
ISSN 2963-3176

B. Pancasila menjadi identitas bangsa dan ideologi yang menuntun warga negara dan pejabat publik

Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia ialah bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi landasan normatif dan cita-cita bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dengan kata lain, arah dan tujuan berbangsa serta bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang mencerminkan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan (M. Syamsudin, Munthoha, Kartini Parmono, Muzhoffar Akhwan, 2009). Sebagai ideologi bangsa yang menjadi dasar dan pedoman hidup masyarakat Indonesia, Pancasila harus bersifat universal, mencakup seluruh nilai sosial dan budaya bangsa, serta menjadi arah dalam menjalani kehidupan bersama. Keberadaan Pancasila sebagai ideologi nasional diwujudkan melalui perilaku dan tindakan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika ditinjau dari kelima sila yang terkandung di dalamnya, Pancasila sejatinya telah memuat konsep pembentukan karakter manusia Indonesia yang ideal, sebagaimana yang diharapkan oleh para perumusnya.

Berdasarkan Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Universitas Pendidikan Pancasila (2016), ideologi negara tidak hanya berfungsi secara hukum dan formal, tetapi juga perlu diwujudkan dalam perilaku serta kehidupan nyata masyarakat. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut:

1. Ideologi sebagai Penuntun Negara

Dengan kata lain, setiap tindakan warga negara harus berpijak pada landasan moral. Contohnya, maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda mencerminkan bahwa nilai-nilai moral ideologis belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pedoman yang lebih konkret, baik dalam bentuk pendekatan persuasif, himbauan, maupun pengintegrasian nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan hukum yang mampu memberikan arah yang jelas serta sanksi yang sepadan bagi pelanggarnya.

2. Ideologi Sebagai Penolakan Terhadap Nilai-nilai yang Tidak Sesuai dengan Pancasila

Pancasila sebagai ideologi negara telah menghadapi berbagai tantangan sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Beberapa pihak bahkan berupaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Salah satu contohnya adalah tindakan terorisme yang menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak. Perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan nilai toleransi beragama, hak asasi manusia,

Karya ini dilisensikan di bawah *Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License* .

Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)
e-ISSN: 2963-3176 Page. 77-95
Vol. 05 No. 06 (2026): November 2026
DOI: ***https://doi.org/10.9000/jpt.v5i6.2257***
Received: 12 Oktober. ***Revised:*** 27 Oktober. ***Published:*** 10 November.
Available online at : https://jupetra.org/index.php/jpt/issue/archive
ISSN 2963-3176

serta semangat persatuan bangsa.

Dinamika Dan Tantangan Pancasila

A. Menguraikan bagaimana pancasila berperan dan menghadapi tantangan di berbagai era , seperti orde lama, orde baru, hingga reformasi

Dinamika Pancasila dari Masa Ke Masa. Pancasila memiliki makna sebagai kekuatan penggerak dan semangat juang yang menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seiring berjalannya waktu, nilai-nilai Pancasila terus mengalami perubahan penafsiran dan penerapan sesuai dengan situasi serta tantangan setiap zaman (Kaelan, 2013). Pada masa Orde Lama (1959–1966) di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, penerapan Pancasila menghadapi berbagai kesulitan. Indonesia saat itu baru saja merdeka dan masih berada dalam masa transisi menuju stabilitas nasional. Pancasila dijadikan dasar ideologis negara, namun dalam praktiknya seringkali diwarnai kepentingan politik. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Soekarno menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin yang membuat kekuasaan presiden menjadi sangat dominan. Meskipun Soekarno berupaya menempatkan Pancasila sebagai landasan revolusi bangsa, penerapannya kerap menyimpang dari nilai-nilai dasar demokrasi. Campuran antara nasionalisme, komunisme, dan agama (Nasakom) juga menimbulkan ketegangan antara kelompok politik, militer, dan agama (Djamaluddin, 2008). Puncaknya adalah peristiwa G30S/PKI tahun 1965, yang menjadi titik balik berakhirnya era Orde Lama dan membuka jalan bagi munculnya pemerintahan baru di bawah Soeharto (Kaelan, 2013).

Pada masa Orde Baru, pemerintahan Soeharto berupaya menegakkan kembali Pancasila sebagai dasar negara yang dijalankan secara “murni dan konsekuen”. Melalui program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), pemerintah berusaha menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, Pancasila sering dimanfaatkan untuk memperkuat legitimasi kekuasaan. Kritik terhadap pemerintah sangat dibatasi, dan kebebasan pers mengalami tekanan yang bertentangan dengan semangat demokrasi dalam sila keempat (Haryatmoko, 2010). Krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 kemudian memicu demonstrasi besar-besaran hingga berakhir dengan pengunduran diri Soeharto pada Mei 1998 (Suryadinata, 2013).

Memasuki era Reformasi, Pancasila kembali ditempatkan sebagai pedoman moral dan arah pembaruan bangsa. Reformasi muncul sebagai respons terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan dan lemahnya penegakan nilai-nilai keadilan. Dalam konteks ini, Pancasila diharapkan menjadi dasar

Karya ini dilisensikan di bawah *Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License* .

Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)
e-ISSN: 2963-3176 Page. 77-95
Vol. 05 No. 06 (2026): November 2026
DOI: ***https://doi.org/10.9000/jpt.v5i6.2257***
Received: 12 Oktober. ***Revised:*** 27 Oktober. ***Published:*** 10 November.
Available online at : https://jupetra.org/index.php/jpt/issue/archive
ISSN 2963-3176

dalam memperkuat demokrasi dan menjaga keseimbangan di tengah pengaruh globalisasi (Yudi Latif, 2011). Melalui pelaksanaan Pemilu dan Pilkada secara langsung, rakyat memperoleh kesempatan untuk menegakkan prinsip kedaulatan sesuai sila keempat Pancasila. Meski demikian, tantangan baru seperti maraknya korupsi, politik uang, dan rendahnya pendidikan politik masih menghambat terwujudnya keadilan sosial yang menjadi cita-cita bersama (Mahfud MD, 2009). Karena itu, penguatan pendidikan Pancasila dan nasionalisme di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, menjadi langkah penting agar nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan relevan dalam kehidupan berbangsa (Anshari, 2018).

Dalam perjalanan sejarahnya, Pancasila tidak hanya menghadapi dinamika internal, tetapi juga berhadapan dengan berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan sosial, politik, dan global. Tantangan-tantangan tersebut perlu dihadapi secara bijak agar nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. Tantangan Kapitalisme

Kapitalisme menekankan kebebasan individu untuk mengembangkan usaha dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Meskipun pada satu sisi dapat mendorong kemajuan ekonomi, namun disisi lain paham ini sering kali menimbulkan kesenjangan sosial dan melemahkan semangat kebersamaan. Dalam konteks Pancasila, kapitalisme menjadi tantangan karena dapat mengikis nilai keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima. Jika kebebasan individu dijalankan tanpa batas, maka kepentingan bersama dapat terabaikan dan tujuan kesejahteraan seluruh rakyat sulit terwujud (Suyatno, 2017).

2. Tantangan Komunisme

Komunisme muncul sebagai reaksi terhadap kapitalisme, dengan menekankan kepemilikan alat produksi oleh negara demi pemerataan kesejahteraan rakyat. Namun, dalam praktiknya, sistem ini sering menyebabkan dominasi negara yang berlebihan dan meniadakan kebebasan warga. Pandangan tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan prinsip kerakyatan yang menjadi dasar dalam Pancasila (Kaelan, 2010). Oleh karena itu, penerapan nilai Pancasila penting untuk menjaga keseimbangan antara peran negara dan kebebasan rakyat dalam mengatur kehidupan berbangsa.

3. Tantangan Globalisasi

Globalisasi membawa kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi yang memudahkan

Karya ini dilisensikan di bawah *Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License* .

Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)
e-ISSN: 2963-3176 Page. 77-95
Vol. 05 No. 06 (2026): November 2026
DOI: ***https://doi.org/10.9000/jpt.v5i6.2257***
Received: 12 Oktober. ***Revised:*** 27 Oktober. ***Published:*** 10 November.
Available online at : https://jupetra.org/index.php/jpt/issue/archive
ISSN 2963-3176

interaksi antarnegara. Namun, arus globalisasi juga dapat mengancam jati diri bangsa apabila tidak disikapi secara kritis. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat menggeser cara pandang masyarakat, terutama generasi muda. Karena itu, penguatan karakter dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting agar bangsa Indonesia tetap memiliki kepribadian yang kuat di tengah perubahan global (BPIP, 2023; Wuryandani, 2015).

4. Tantangan Disintegrasi Bangsa

Menurunnya semangat nasionalisme serta meningkatnya sikap kedaerahan menjadi tantangan lain bagi persatuan Indonesia. Modernisasi dan globalisasi sering kali membuat masyarakat lebih mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan nasional. Jika hal ini dibiarkan, rasa persaudaraan dan persatuan akan melemah, yang pada akhirnya dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, memperkuat semangat kebangsaan serta menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila menjadi langkah penting dalam menjaga persatuan bangsa (BPIP, 2022; Suryadinata, 2000).

Dengan memahami berbagai tantangan tersebut, masyarakat diharapkan mampu menjadikan Pancasila bukan sekadar simbol, tetapi juga pedoman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila harus terus diinternalisasi agar dapat menjadi benteng moral dalam menghadapi perubahan zaman serta menjaga keutuhan bangsa Indonesia.

B. Menekankan pentingnya pancasila sebagai dasar filsafat negara yang tetap bertahan dan relevan di tengah arus globalisasi

1. Dinamika dan Tantangan Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Kata ini tersusun dari dua bagian, yaitu philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan (Kaelan, 2013). Dalam konteks kenegaraan Indonesia, Pancasila dipahami tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sistem filsafat yang memuat nilai-nilai fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai sistem filsafat, Pancasila berperan sebagai kerangka berpikir yang menyatukan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual dalam satu kesatuan yang harmonis. Setiap sila saling berhubungan dan membentuk struktur yang utuh serta menyeluruh, mencerminkan keseimbangan antara aspek

Karya ini dilisensikan di bawah *Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License* .

Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)
e-ISSN: 2963-3176 Page. 77-95
Vol. 05 No. 06 (2026): November 2026
DOI: ***https://doi.org/10.9000/jpt.v5i6.2257***
Received: 12 Oktober. ***Revised:*** 27 Oktober. ***Published:*** 10 November.
Available online at : https://jupetra.org/index.php/jpt/issue/archive
ISSN 2963-3176

ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial (Notonagoro, 1983). Dengan demikian, Pancasila bukan hanya kumpulan prinsip yang bersifat normatif, melainkan pandangan hidup yang menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Pancasila juga mencerminkan pandangan hidup yang menempatkan manusia dalam hubungan yang seimbang dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Nilai-nilai Pancasila memungkinkan bangsa Indonesia untuk memadukan tradisi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Hal ini menjadikan Pancasila relevan sebagai pedoman moral dan etika di tengah perubahan sosial dan global yang semakin cepat (Driyarkara, 1980).

Pemahaman terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat juga berkembang seiring perubahan zaman. Pada masa Soekarno, Pancasila dikenal dengan istilah Philosofische Grondslag atau dasar filosofis negara. Gagasan ini muncul sebagai hasil perenungan Soekarno mengenai dasar bagi negara Indonesia merdeka, yang kemudian disampaikan dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Soekarno menegaskan bahwa Pancasila merupakan refleksi dari nilai-nilai asli bangsa Indonesia yang digali dari kebudayaan dan kehidupan masyarakat (Kaelan, 2016). Sementara itu, pada masa pemerintahan Soeharto, Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami pergeseran ke arah yang lebih praktis. Nilai-nilainya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui kebijakan dan program pembangunan nasional. Dalam konteks ini, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar berpikir, tetapi juga sebagai ideologi pembangunan yang mengarahkan arah kebijakan negara (Notonagoro, 1983).

Memasuki era Reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat sempat mengalami penurunan perhatian. Dalam pidatonya pada 1 Juni 2011, B. J. Habibie menyoroti bahwa Pancasila seolah-olah tenggelam dalam hiruk-pikuk demokrasi dan politik pasca reformasi. Nilai-nilainya jarang dikaji dan dibahas secara mendalam, baik dalam ruang akademik maupun kehidupan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya untuk menghidupkan kembali kesadaran filosofis terhadap Pancasila agar tetap menjadi dasar dalam pembentukan karakter dan arah pembangunan bangsa (Habibie, 2011).

Tantangan Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Dalam kedudukannya sebagai sistem filsafat, Pancasila tidak lepas dari berbagai tantangan

Karya ini dilisensikan di bawah *Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License* .

Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)
e-ISSN: 2963-3176 Page. 77-95
Vol. 05 No. 06 (2026): November 2026
DOI: ***https://doi.org/10.9000/jpt.v5i6.2257***
Received: 12 Oktober. ***Revised:*** 27 Oktober. ***Published:*** 10 November.
Available online at : *https://jupetra.org/index.php/jpt/issue/archive*
ISSN 2963-3176

yang muncul seiring perkembangan pemikiran dan perubahan sosial global. Tantangan-tantangan ini menguji sejauh mana Pancasila mampu bertahan sebagai dasar pemikiran yang mempersatukan bangsa Indonesia. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Tantangan Kapitalisme

Kapitalisme muncul sebagai paham yang menekankan kebebasan individu dalam kepemilikan modal dan pengembangan usaha untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Walaupun dapat meningkatkan produktivitas ekonomi, sistem ini sering kali menimbulkan kesenjangan sosial dan melemahkan semangat gotong royong. Pandangan tersebut berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kerangka filsafat Pancasila, keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama harus dijaga agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial (Magnis-Suseno, 1992).

2. Tantangan Komunisme

Sebaliknya, komunisme menempatkan negara sebagai pengendali penuh terhadap alat-alat produksi demi pemerataan kesejahteraan rakyat. Meskipun tujuan dasarnya menekankan keadilan sosial, dominasi negara yang terlalu kuat dapat menghilangkan kebebasan individu dan melemahkan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan prinsip kerakyatan yang menjadi bagian dari filsafat Pancasila (Kaelan, 2013). Oleh karena itu, tantangan kapitalisme dan komunisme menunjukkan bahwa Pancasila harus tetap menjadi dasar filsafat yang menjaga keseimbangan antara kebebasan dan keadilan, antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Dengan memahami Pancasila secara mendalam sebagai sistem filsafat, masyarakat diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilainya dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kesimpulan

Pancasila lahir dari hasil pemikiran yang mendalam para pendiri bangsa dan menjadi dasar yang kokoh bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses perumusannya tidak terjadi secara instan, melainkan melalui perdebatan dan semangat persatuan dari berbagai golongan yang memiliki latar belakang berbeda hingga akhirnya disahkan pada 18 Agustus 1945. Nilai-nilai yang

Karya ini dilisensikan di bawah *Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License* .

Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)
e-ISSN: 2963-3176 Page. 77-95
Vol. 05 No. 06 (2026): November 2026
DOI: ***https://doi.org/10.9000/jpt.v5i6.2257***
Received: 12 Oktober. ***Revised:*** 27 Oktober. ***Published:*** 10 November.
Available online at : https://jupetra.org/index.php/jpt/issue/archive
ISSN 2963-3176

terkandung dalam Pancasila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi pedoman moral sekaligus dasar hukum dan politik bangsa Indonesia. Sejak masa awal kemerdekaan hingga era reformasi, Pancasila senantiasa berperan sebagai penuntun arah bangsa dalam menghadapi tantangan zaman, menjaga persatuan di tengah perbedaan, serta meneguhkan karakter bangsa yang berkeadilan dan beradab. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, Pancasila tetap relevan sebagai landasan moral untuk menyeimbangkan kemajuan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga kompas kehidupan yang harus dijaga, dipahami, dan diamalkan oleh seluruh warga negara demi terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat.

Referensi

Kartika Suri. (2018). Penanaman Karakter Tanggung Jawab Melalui Pembelajaran PendidikanAi Lisnawati & Dinie Anggraeni Dewi. (2022). Meneguhkan Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(2), 9893–9900.

Anshari, E. (2019). Dinamika Perumusan Pancasila dan Implikasinya terhadap Pembentukan Identitas Nasional. Jurnal Sejarah dan Budaya, 13(2), 120–134.

Anshari, E. S. (2018). Pancasila dan Tantangan Reformasi. Bandung: Alfabeta.

BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). (2022). Laporan Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Tahun 2022. Jakarta: BPIP RI.

BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). (2023). Survei Persepsi Masyarakat terhadap Nilai Pancasila di Era Digital. Jakarta: BPIP RI.

Djamaluddin, A. (2008). Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. Bandung: Alfabeta.

Driyarkara, N. (1980). Tentang Manusia dan Eksistensinya. Jakarta: Gramedia.

Habibie, B. J. (2011). Pidato Peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2011. Jakarta: Sekretariat Negara.

Haryatmoko. (2010). Etika Politik dan Kekuasaan. Jakarta: Kompas.

Kaelan, M. S. (2002). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.

Kaelan, M. S. (2010). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.

Kaelan, M. S. (2013). Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Paradigma.

Kaelan, M. S. (2013). Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, dan Yuridis. Yogyakarta: Paradigma.

Kaelan, M. S. (2016). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.

Kaelan, M. S. (2018). Pendidikan Pancasila: Paradigma, Ideologi, dan Konstitusi. Yogyakarta: Paradigma Press.

Karya ini dilisensikan di bawah *Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License* .

Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)
e-ISSN: 2963-3176 Page. 77-95
Vol. 05 No. 06 (2026): November 2026
DOI: ***https://doi.org/10.9000/jpt.v5i6.2257***
Received: 12 Oktober. ***Revised:*** 27 Oktober. ***Published:*** 10 November.
Available online at : https://jupetra.org/index.php/jpt/issue/archive
ISSN 2963-3176

Lickona, T. (2013). Pendidikan karakter: Pembinaan kebajikan. Dalam Teori dan model desain instruksional (hlm. 591–612). Routledge.

Mahfud, M. D. (2009). Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Reformasi. Jakarta: LP3ES.

Magnis-Suseno, F. (1992). Etika Sosial: Dasar dan Prinsip Hidup Bersama. Yogyakarta: Kanisius.

Miftahul Ikrom, Beti Zania, & Siti Tiara Maulia. (2023). Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2(1), 112–122.

Minarso, I. P., & Najicha, F. U. (2022). Upaya Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Untuk Melawan Globalisasi. Jurnal Kewarganegaraan, 6(1), 543–551.

Naifa Maharani Zerlina. (2020). Penanaman Pancasila sebagai dasar negara untuk pembangunan karakter bangsa Indonesia. Jurnal Pancasila dan Bela Negara, 4(2).

Notonagoro. (1975). Pancasila Secara Ilmiah Populer. Jakarta: Bumi Aksara.

Notonagoro. (1983). Pancasila Secara Ilmiah Populer. Jakarta: Bumi Aksara.

Nurwardani, P., Saksama, H. Y., Kuswanjono, A., Munir, M., Mustansyir, R., Nurdin, E. S., ... & Festanto, A. (2016). Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi: Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila. Indonesia Prime.

Rachman, B. (2015). Dinamika Pancasila dari Orde Lama ke Orde Reformasi. Jurnal Cakrawala Pancasila, 2(1), 15–27.

Ratri, E. P., & Najicha, F. U. (2022). Urgensi Pancasila dalam Menanamkan Jiwa Nasionalisme pada Generasi Muda di Era Globalisasi. Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, 11(1), 25–33.

Setialaksana, A. (2017). Proses Perumusan Dasar Negara Pancasila dalam Sidang BPUPKI dan PPKI. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(2), 101–112.

Siswadi, G. A., & Putri, K. (2024). Pendidikan Perdamaian Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Fondasi Pendidikan Untuk Kemanusiaan di Tengah Keberagaman. Vidya Samhita: Jurnal Penelitian Agama, 10(1), 63-72.

Suhartono, H. (2018). BPUPKI dan Perumusan Konstitusi Awal Negara Indonesia. Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 6(1), 34–48.

Sunaryo, S. Konsensus Berkeadilan dalam Konstitusi Indonesia dan Tantangan-tantangannya. Jurnal Konstitusi.

Suryadinata, L. (2000). Nasionalisme, Etnisitas, dan Integrasi Nasional Indonesia. Jakarta: LP3ES.

Suryadinata, L. (2013). Indonesia's Political Culture: The Pancasila State. Singapore: ISEAS Publishing.

Suyatno. (2017). Pancasila dan Tantangan Ideologi Global. Yogyakarta: UNY Press.

Syamsudin, M., Munthoha, K. P., & Muzhoffar Akhwan, B. R. (2009). Pendidikan Pancasila. Total Media.

Unggul, A. R. P., Ajati, D. T., Saputra, R. W., & Fitriono, R. A. (2022). Pancasila sebagai dasar negara. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 4(4), 25–31.

Karya ini dilisensikan di bawah *Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License* .

Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)
e-ISSN: 2963-3176 Page. 77-95
Vol. 05 No. 06 (2026): November 2026
DOI: ***https://doi.org/10.9000/jpt.v5i6.2257***
Received: 12 Oktober. ***Revised:*** 27 Oktober. ***Published:*** 10 November.
Available online at : https://jupetra.org/index.php/jpt/issue/archive
ISSN 2963-3176

Wibowo, K. A., & Najicha, F. U. (2022). Aktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat di Era Globalisasi. EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling, 4(1), 22–31.

Wuryandani, W. (2015). Penguatan Karakter Bangsa melalui Nilai-nilai Pancasila di Era Globalisasi. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi.

Wuryandani, W. (2020). Nilai-Nilai Pancasila dalam Piagam Jakarta dan Relevansinya terhadap Ketahanan Nasional. Jurnal Ketahanan Nasional, 26(1), 45–59.

Yudi Latif. (2011). Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia.

Yuliatin. (2023). Pancasila: Karakter Khas Bangsa Indonesia. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 8(1), 460–467.

Karya ini dilisensikan di bawah *Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License* .